

## Pendidikan yang Memberdayakan\*

*Suwito*

Guru Besar Sejarah Pemikiran dan Pendidikan Islam  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Permasalahan pendidikan sangat kompleks, sejalan dengan makin kompleksnya kehidupan masyarakat. Berbagai faktor saling berkaitan seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan lainnya. Oleh karenanya, suatu masalah pendidikan tidak mungkin bisa dijelaskan apalagi diselesaikan hanya oleh ilmu pendidikan itu sendiri. Masalah pendidikan adalah masalah manusia yang terkait oleh ruang dan waktu serta berinteraksi dengan bidang lainnya.

Di antara upaya untuk menyelesaikan masalah pendidikan, diperlukan beberapa pemikiran yang dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang lebih fundamental. Oleh karena itu, uraian berikut diharapkan dapat

menemukan jawaban yang dimaksud.

### Beragam Kritik

Muhammad Abduh (1849 – 1905) dapat disebut sebagai tokoh yang banyak melakukan kritik terhadap praktik pendidikan yang dilakukan umat Islam. Ia antara lain menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan para guru adalah salah. Ia mencontohkan, para guru memberikan term-term tata bahasa Arab dan hukum fiqh untuk dihafal tanpa menjelaskan term-term itu. Abduh secara keras mengkritik pengajaran di al-Azhar Mesir.<sup>1</sup>

Menurut pengamatan Abduh, pendidikan cenderung menghasilkan lulusan dan masyarakat *jumud*, beku, statis, dan tidak ada perubahan. Karena paham *jumud* ini, maka umat Islam tidak menghendaki perubahan, dan tidak mau menerima perubahan.<sup>2</sup>

Selain Abduh, Fadhil al-Jamali, seorang ilmuwan Muslim berkebangsaan Irak yang hijrah ke Tunisia kemudian menjadi Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan di Universitas Tunis, juga tergolong orang yang terpanggil untuk memberikan berbagai kritik terhadap pendidikan Islam. Ia mengakui bahwa umat Islam mengalami keterbelakangan di bidang pendidikan. Menurutnya, keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan berbagai kemunduran dan keterbelakangan di bidang-bidang lain.<sup>3</sup> Seharusnya orang-orang yang bertugas di bidang pendidikan, menurutnya, menyediakan obat penyembuh segala penyakit yang dilaporkan

masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya justru sebaliknya, mereka sendiri malah menjadi orang sakit.

Malik Fajar berpendapat bahwa dalam tataran normatif filosofis, pendidikan Islam selalu berkuat pada perdebatan semantik, apakah pendidikan Islam menggunakan peristilahan *tarbiyah*, *ta'dib*, atau *ta'lim*. Dari segi muatan (*content*), pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikhotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Selain itu, pendidikan Islam juga dinilai masih belum menuntaskan konsep-konsep normatif yang berhubungan dengan cita ideal manusia yang dihasilkan.<sup>4</sup> Oleh karenanya, diperlukan reorientasi dan reformasi dalam pendidikan Islam.

#### **Multipersoalan Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan secara umum di Indonesia juga mendapat berbagai kritik. Di antaranya terlihat dalam uraian berikut.

Kantor Wilayah Pendidikan Nasional DKI Jakarta telah melakukan penelitian tentang mutu dan kompetensi guru. Dalam uji pemahaman ilmu dan kurikulum terhadap 3.000 guru SMU di Jakarta, 421 di antaranya adalah guru fisika. Dari jumlah itu lebih dari 90% hanya mendapatkan nilai di bawah lima. Bahkan, dalam seminar tentang rivalitas sumber daya manusia dalam upaya pemberdayaan madrasah di Jakarta, pertengahan September 2001, terungkap bahwa jumlah guru madrasah yang berkualitas di Jakarta hanya 203.485 orang atau

53,2%. Sisanya, 179.329 atau 46,8% dinilai tidak berkualitas.<sup>5</sup>

Para ahli pendidikan Indonesia yang artikelnya dimuat dalam buku *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia* umumnya merasakan kegelisahan akan beberapa kekurangan yang ada pada dunia pendidikan. Aljufri B. Syarif, misalnya, cukup gelisah karena pembaharuan pendidikan di Indonesia lebih banyak bersifat *periferal* dan bukan memecahkan masalah yang fundamental. Ia juga resah karena isu pembaharuan pendidikan hampir selalu datang dari para pengambil keputusan, bukan dari lapangan, anak didik dan guru.

*The Jakarta Post*, edisi 3 September 2001 melaporkan hasil survei yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong. Hasil survei menyimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia berada di urutan ke-12 setelah Vietnam.<sup>6</sup>

Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia No. 16369-IND, dari hasil studi di Asia Timur, menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada tingkat terendah.<sup>7</sup> Anak-anak kita hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Selain itu, hasil studi *The Third International Mathematics and Science Study*, 1999, memperlihatkan bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi siswa kelas II SLTP Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA dan ke-34

untuk matematika. Sedangkan di dunia pendidikan tinggi, dari data yang disajikan *Asia Week* menunjukkan bahwa empat universitas terbaik di Indonesia, ternyata, menempati peringkat ke-61, 68, 73, dan ke-75 dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik. Suyanto menyebutkan bahwa mutu pendidikan nasional yang masih jauh dari harapan itu terkait dengan kualitas guru SD/MI yang rendah.<sup>8</sup> Aspek lain yang perlu diperhatikan, lanjut Suyanto, adalah kemerosotan akhlak dan moral masyarakat Indonesia. Indikatornya, antara lain, terjadinya praktik KKN, berbagai pelanggaran hukum dan HAM, pengedaran narkoba, penyebaran HIV/AIDS, dan banyaknya tawuran di berbagai tempat.

Dalam lokakarya Kebijakan Nasional tentang Dewan Sekolah di Padang, Deputi SDM Bappenas Lela Ratna Komala mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian *Human Development Index* (HDI-UNDP) tahun 2000 peringkat mutu pendidikan Indonesia berada di urutan 109.<sup>9</sup>

Sementara itu, nilai hasil tes ujian calon mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2001/2002 untuk lima bidang studi (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Pengetahuan Agama, dan Pengetahuan Umum) ternyata tidak mencapai angka rata-rata 60.<sup>10</sup> Tidak mengherankan jika Institut Teknologi Bandung (ITB) masih mewajibkan semua mahasiswa barunya mengambil mata kuliah matrikulasi pada ilmu-ilmu yang dinilai dasar bagi ITB.<sup>11</sup>

## Dialog Pemberdayaan

Pendidikan di Indonesia masih diberlakukan sebagai lembaga yang mencetak "tenaga kerja", dan bukan sebagai lembaga yang menghasilkan manusia utuh. Sekolah atau kuliah dijalani seseorang agar mendapatkan ijazah untuk bekerja<sup>12</sup>. Proses sekolah/kuliah tidak dinikmati, karena dianggap tidak penting. Mental demikian dapat menjadi faktor yang akan merusak kehidupan masyarakat.

A. Malik Fadjar—sebelum menjadi Mendiknas—dalam seminar pendidikan oleh Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia, Selasa 5 Juni 2001, di Jakarta, menyatakan bahwa perguruan swasta di bawah Muhammadiyah, Taman Siswa, ataupun lembaga agama Kristen (dan swasta lainnya—pen.) lebih baik membebaskan dirinya dari pemikiran pemerintah. Pasalnya, keberadaan perguruan swasta merupakan cikal bakal pelopor pendidikan di tanah air yang sudah sejak lama independen. Peran pemerintah bagi perguruan swasta sebaiknya hanya menjadi mitra dalam konteks akademik dan mengurus hal-hal lebih teknis. Kekuatan perguruan swasta justru pada kepeloporan dan kemandiriannya, sedangkan peran pemerintah hanya begitugitu saja. Pemerintah lebih banyak mengurus administrasi, menerima setoran, dan memperbanyak buku.

Selanjutnya A. Malik Fadjar, mengingatkan agar perguruan swasta selalu menyegarkan dan menghidupkan filosofi, *input*, proses, dan keluaran dari sebuah

proses pendidikan. Menurutnya, filosofi menjadi energi kita, oleh karena itu ia harus terus menerus menyala. Dalam proses pendidikan ia cenderung membiarkan swasta melakukannya dengan kekuatan dan ciri sendiri, serta tidak melakukan sesuatu secara rutin. Pelajaran agama pun hendaknya bisa membawa wacana hidup yang segar, bukan sekedar menakut-nakuti. Adapun *output* pendidikan merupakan cermin dari potret lulusan yang mempunyai prototipe sendiri. Itu sebabnya, A. Malik Fajar mengusulkan pembubaran Ulangan Umum Bersama (UUB), Ebtanas, dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Sebab, menurutnya, masing-masing perguruan punya standar. Sebagai gantinya diadakan saja standar akreditasi. Perguruan tinggi biarkan membuat tes masuk sendiri-sendiri sehingga ada kompetisi kualitas, bukan hanya melihat dari Nilai Ebtanas Murni (NEM).

Perlu dipikirkan lebih jauh bahwa adanya sekat-sekat fakultas, jurusan/program studi yang terlalu ketat sejak awal sekolah atau kuliah cenderung dapat memasung potensi siswa atau mahasiswa untuk berkembang lebih jauh. Pemilihan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum sebaiknya berupa mata kuliah wajib yang minim dan yang mayoritas adalah mata kuliah pilihan.

Berdasarkan pertimbangan ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya penentuan fakultas, jurusan/program studi bagi

mahasiswa dapat diduga setelah lulus mata kuliah pilihan senilai 36-42 sks. Berdasarkan perhitungan ini diharapkan mahasiswa akan lebih yakin dalam menentukan fakultas, jurusan/program studi yang lebih sesuai dengan minat dan bakatnya.

Diakui bahwa kebijakan yang demikian memerlukan administrasi yang canggih, sistem komputerisasi yang prima, bermental baja untuk tidak berebut mahasiswa, dan toleransi yang tinggi jika suatu program studi tidak mendapatkan peminat.

Lembaga pendidikan yang demikian agaknya dapat dikatakan lebih memberdayakan dibanding memperlakukan para mahasiswa sebagai penerima *dawuh* berupa paket jadwal dan paket mata kuliah seperti yang terjadi sampai sekarang pada umumnya di perguruan tinggi.

### **Perspektif Islam**

Pendidikan di dunia Islam sesudah abad ke-12 dirasakan kurang memberdayakan terhadap banyak hal. Al-Quran dan al-Sunnah tidak dijadikan motivator penggerak bagi pemberdayaan. Al-Quran dan al-Sunnah sudah lama ditinggalkan umat Islam.<sup>13</sup> Yang dipelajari umat Islam adalah selain al-Quran, melainkan ilmu-ilmu yang muncul karena motivasi al-Quran. Pada umumnya yang dipelajari umat Islam adalah Ulum al-Quran, Tafsir, Fiqh dan semacamnya. Ilmu-ilmu ini sebenarnya lahir karena adanya al-Quran. Ayat-ayat al-Quran cenderung dipahami menurut pemahaman mufassirnya. Akibatnya, para

pengkaji tafsir tidak leluasa mengembangkan makna ayat-ayat al-Quran.

Para siswa dan mahasiswa tidak didorong berlatih melahirkan Ulum al-Quran yang baru. Yang ada hanya dipaksa memahami Ulum al-Quran karya orang lain. Para siswa dan mahasiswa tidak didorong dan diberi kesempatan melahirkan pemikiran fiqh yang baru, yang ada hanya berkuat kepada pemahaman pemikiran fiqh ulama terdahulu. Sebagai akibat dari pengajaran yang demikian, kitab-kitab selain al-Quran cenderung menempati posisi atas dalam pelajaran dan al-Quran ditempatkan pada posisi di bawahnya atau bahkan tidak sempat dikaji secara mendalam.

Sehubungan dengan hal tersebut Abu al-Hasan al-Amiri (w. 381 H/992 M) sangat menekankan untuk tidak mengadakan dikotomi pembelajaran ilmu-ilmu hasil pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan.<sup>14</sup> Karena ilmu-ilmu selain al-Quran merupakan hasil ijtihad yang perlu dikritisi agar tidak terjebak pada paham bahwa ilmu-ilmu tersebut sebagai ilmu yang final dan absolut. Hal itu dikarenakan para ahli tersebut bukanlah manusia *ma'shûm*.<sup>15</sup>

Pendapat serupa dimajukan juga oleh Abduh (1849–1905). Menurutny, ijtihad hendaklah dilakukan secara langsung terhadap ayat-ayat al-Quran dan Hadits, sedangkan pendapat ulama terdahulu tidak mengikat karena mereka tidak *ma'shûm*.<sup>16</sup> Pendapat al-Amiri dan Abduh ini sulit dilaksanakan apabila pola pikir rasional tidak ditumbuh

kembangkan. Oleh karena itu, agar ilmu pengetahuan dapat berkembang, Harun Nasution menekankan adanya perubahan sikap dari mental tradisional menjadi mental yang rasional.<sup>17</sup>

Beberapa kebijakan pemerintah dan pendapat mayoritas umat Islam Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang juga dinilai turut menjadikan pendidikan di kalangan umat Islam tidak berdaya dan memberdayakan.<sup>18</sup>

Dampak dari kebijakan tersebut, makna pendidikan Islam menyempit menjadi sekedar pengajaran agama. Ilmu rasional dianggap sekuler dan diharamkan masuk ke dalam kurikulum. Upaya A. Mukti Ali ketika menjadi Menteri Agama RI misalnya, untuk menyejajarkan lulusan madrasah dengan sekolah umum pada 1974 sampai 1975 ternyata mendapat tantangan yang luar biasa di kalangan umat Islam sendiri karena dinilai akan menghancurkan lembaga pendidikan Islam. Tantangan muncul kembali ketika ia membuat kebijakan berupa pengiriman para dosen IAIN ke Barat.<sup>19</sup> Nasib serupa menimpa ketika sebagian IAIN akan diubah menjadi universitas.

Fazlur Rahman (w. 1998) sebagaimana dikutip *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, jilid 5, h. 2 berpendapat bahwa sejarah pendidikan di dunia Islam lebih mencerminkan sejarah pendidikan agama dan bukan pendidikan Islam. Hal ini terutama tampak sejak abad ke-12, ketika sains, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial dikeluarkan dari kurikulum sekolah dan universitas. Hal ini berawal dari

disintegrasi ilmu pengetahuan dalam sistem pemikiran Islam, ketika ilmu rasional dianggap berbahaya bagi agama dan para sarjana yang mengembangkannya dimusuhi.

Penyempitan makna pendidikan Islam berlangsung hingga tingkat pelembagaan dan metodenya, khususnya di kalangan santri. Para ulama mulai menarik garis tegas antara ilmu sekuler dan ilmu agama. Mereka menentang ilmu sekuler dan mengeluarkan dari kurikulum madrasah. Anak didik lebih banyak diminta menghafalkan teks baku dibandingkan mengembangkan pemikiran kreatif.

Dalam sejarahnya, sikap kritis atas kekurangan dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, karena sikap serupa ini akan melahirkan keputusan atau aksi-aksi baru yang dinilai dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Mengkritisi suatu perguruan tinggi semisal IKIP, telah melahirkan universitas.<sup>20</sup> Mengkritisi pesantren tradisional melahirkan pesantren modern. Mengkritisi kedua model pesantren tersebut melahirkan pesantren kilat. Mengkritisi madrasah tradisional yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama melahirkan madrasah modern yang juga mempelajari ilmu-ilmu umum. Mengkritisi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, melahirkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)<sup>21</sup> melalui Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960. Kritik ketidakpuasan terhadap IAIN yang menyediakan program studi keaga-

maan semata, melahirkan IAIN *with wider mandate* (dengan mandat yang diperluas). Mengkritisi berbagai IAIN-cabang melahirkan STAIN.<sup>22</sup> Mengkritisi IAIN *with wider mandate* memunculkan Universitas Islam Negeri (UIN).

Hanya saja, upaya membuka kesadaran kritis ini sering dipahami pihak penguasa sebagai suatu "gerakan politik" ketimbang suatu gerakan yang berupaya mencerdaskan rakyat. Karena itu, pada 1964 Freire diusir oleh pemerintah untuk meninggalkan Brazil. Pendidikan model ini merupakan pendidikan yang membawa masyarakat dari kondisi "masyarakat kerucut" (*submerged society*) kepada masyarakat terbuka (*open society*).<sup>23</sup>

Berdasarkan cermin Freire tersebut, perlu dicermati kembali hakekat Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT untuk manusia. Pendidikan pemberdayaan atau pembebasan yang digelindingkan Freire sebetulnya telah diterapkan Nabi Muhammad dalam strategi dakwah Islam menuju transformasi sosial. Gerakan dakwah pada masa Nabi dipraktikkan sebagai gerakan pembebasan dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam segala aspeknya. Nabi, dalam kerangka dakwah Islam untuk pemberdayaan dan pembebasan umat, tidak langsung menawarkan Islam sebagai sebuah ideologi yang normatif, melainkan sebagai pengakuan terhadap perlunya memperjuangkan secara serius problem bipolaritas spiritual-material kehidupan manusia, dengan penyusunan kembali tatanan yang telah ada menjadi

tatanan yang tidak eksploitatif, adil dan egaliter. Islam adalah agama pemberdayaan dan pembebasan karena Islam memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan benar, dan mengasihi yang lemah dan tertindas. Firman Allah dalam al-Qur'an di antaranya mengajarkan "...Kami bermaksud memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi ..." (QS. 28:5).

Sikap kritis dan tidak puas seperti gambaran di atas tidak harus dipahami sebagai pemikiran yang negatif. Sikap semacam ini justru perlu dikembangkan agar terjadi perkembangan pemikiran di berbagai bidang.

### Penutup

Untuk rekonseptualisasi dan sosialisasi *pendidikan yang berdaya dan memberdayakan* akhirnya tulisan ini ditutup dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pendidikan yang masih berbasis birokrasi harus diganti dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan (*encourage*) pernyataan diri (*self-expression*), dan mengajar siswa/mahasiswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Ke

depan sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti.

3. Sistem pendidikan yang membebani para siswa/mahasiswa dengan jumlah mata pelajaran/mata kuliah yang terlalu banyak dan sifatnya repetitif di semua kelas maupun semester hingga menyerap waktu, membuat proses belajar berfikir menjadi mandul/beku/statis.
4. Proses belajar dengan terlalu banyak memberi tekanan pada menghafal dan *multiple choice* tanpa mempertanyakan "mengapa", tidak banyak membantu pembentukan kepribadian.
5. Peranan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*) harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan.
6. Pendidikan Islam yang berdaya dan memberdayakan akan terwujud apabila:
  - a. Memiliki visi, misi, dan orientasi strategis ke depan yang jelas;
  - b. Memiliki legitimasi sosial, intelektual dan moral yang kuat;

- c. Berbasis pada masyarakat dan merespon tuntutan zaman;
- d. Dikelola dengan manajemen modern yang profesional, rasional, terbuka, akuntabel, humanis, memiliki akses, kerja sama dan kemitraan global.

\* Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Pemikiran dan Pendidikan Islam. Disampaikan di hadapan sidang senat terbuka IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis, 19 Syawwal 1422/3 Januari 2002.

\*\* Guru Besar Sejarah Pemikiran dan Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

<sup>1</sup> Di antara kritik Abdul ketika itu: kurikulum al-Azhar banyak menekankan perbedaan pendapat daripada mempelajari nilai argumentasinya, perbedaan bahasa daripada arti dan tujuan gramatika bahasa, hukum-hukum fiqh yang timbul dalam saat tertentu daripada metode penilaian hukum tersebut untuk dijadikan pedoman. Oleh karena itu, Abdul mencari ilmu ilmu yang disebut oleh Syekh Darwisy di luar al-Azhar. Ilmu ilmu itu ia jumpai pada seorang ulama bernama Syaikh Hasan Thawil yang mengetahui falsafah, logika, ilmu ukur, soal-soal dunia dan politik. Akan tetapi, Abdul kurang puas dengan pelajaran yang diberikannya. Kepuasan dalam mempelajari falsafah, matematika, teologi dan sebagainya ia peroleh dari Jamal al-Din al-Afghani yang datang ke Mesir pada 1870.

<sup>2</sup> Baca Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 62.

<sup>3</sup> Bidang-bidang lain yang dimaksud adalah kemunduran/keterbelakangan di bidang: 1) agama, 2) akhlak, 3) ilmu pengetahuan, 4) teknologi, 5) ekonomi, 6) sosial, 7) kesehatan, 8) politik, dan 9) manajemen.

<sup>4</sup> A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia: 1999), Cetakan 1, h. 79.

<sup>5</sup> <http://www.gamma.co.id/artikel/31-3/pendidikan-GM10109-98.shtml>.

<sup>6</sup> Tabel skor kualitas sistem pendidikan pada 12 negara di Asia. Skor 0 menunjukkan kualitas sistem pendidikan tertinggi dan skor 10 mencerminkan kualitas sistem pendidikan terendah.

Negara	Skor	Negara	Skor
1. Korea Selatan	3.09	7. Malaysia	4.41
2. Singapore	3.19	8. Hongkong	4.72
3. Jepang	3.50	9. Philipina	5.47
4. Taiwan	3.96	10. Thailan	5.96
5. India	4.24	11. Vietnam	6.21
6. Cina	4.27	12. Indonesia	6.56

<sup>7</sup> Ia memberi contoh, dalam skala nasional, berdasarkan studi yang dilakukan menunjukkan rata-rata tes siswa SD kelas VI untuk tiga mata pelajaran pokok (bahasa Indonesia, matematika, dan IPA) adalah 35,33 dan 37 pada 1976, menjadi 27,7; 21,5 dan 24,4 pada 1989 dibandingkan dengan standar penguasaan (50%). Tabel nilai rata-rata kemampuan membaca tingkat SD:

Negara	Nilai Rata-rata
1. Hongkong	75.5
2. Singapura	74.0
3. Thailand	65.1
4. Filipina	52.6
5. Indonesia	51.7

<sup>8</sup>Ia menyatakan, dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8 % yang berpendidikan Diploma II Kependidikan ke atas. Selain itu, dari 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8 % yang lulusan diploma III Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, hanya 57,8 % yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Dan di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen baru 18.56 yang bergelar S2 ke atas (3,48 % berpendidikan S3).

<sup>9</sup>Vietnam yang relatif baru berkembang justru lebih baik, yaitu di urutan 108. Cina 99, Sri Lanka 84, Filipina 77, Thailand 76, Malaysia 61, dan Singapura 24. Sedangkan negara yang baik sistem pendidikannya adalah Kanada, berada di peringkat satu dunia. Baca: *Media Indonesia-Pendidikan dan Kebudayaan* (05 Oktober 2001).

<sup>10</sup> Jika yang diterima nilai minimal 60, maka hanya akan terjaring 5% dari seluruh pendaftar melalui tes masuk.



<sup>11</sup> Informasi diperoleh dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 12 Desember 2001.

<sup>12</sup> Baca artikel Aji Setiawan, *Ada Uang, Bayar, Bawa Gelar: Banyak yang merelakan jutaan rupiah hanya untuk selebar bukti gelar. Demi Gengsi?* Lihat <http://himmah.kampuskita.com/pddk.shtml>.

<sup>13</sup> Lihat juga komentar Abû al-Hasan 'Ali al-Husnî al-Nadawî, *Nahw al-Tarbiyah al-Islâmiyyah al-Hurrah fî al-Hukûmât wa al-Bilâd al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassah al-Risâlah, 1958) h. 13-14 dan 89-90.

<sup>14</sup> Setidaknya ada 5 alasan yang dimajukan al-Amiri tentang ini: 1) wahyu tidak bertentangan dengan pendapat akal, 2) al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mempelajari penciptaan alam, 3) bahwa mempelajari penciptaan alam akan mendapatkan hukum kausalitas, 4) menambah keyakinan, 5) bermanfaat secara nyata bagi kehidupan. Baca Ahmad Abd al Hamid Ghurab, *Abû al-Hasan al-Amiri wa Arâ'uh al-Tarbawiyah*, dalam *Min A'lâm al-Tarbiyah al-Arabiyyah al-Islâmiyyah*, Jilid II. Maktab al-Tarbiyah al-Arabi li Duwal al-Khalij, 1988, h. 96-97.

<sup>15</sup> Ibid. h. 104.

<sup>16</sup> Lihat uraian Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 64.

<sup>17</sup> Baca antara lain pada *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (bandung: Mizan, 1995), h. 146.

<sup>18</sup> Tidak terlalu salah jika Abdul menyatakan bahwa Islam tidak dapat berkembang disebabkan pemeluknya sendiri.

<sup>19</sup> Informasi lebih lengkap baca pada Ali Munhanif, *Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru*, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Ed.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Departemen Agama, 1998), h. 271-319, terutama mulai h. 311.

<sup>20</sup> Antara lain lihat Kepres No. 39 Tahun 1999 tgl. 4 Agustus 1999 berisi perubahan: 1) IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, 2) IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya, 3) IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, 4) IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar, 5) IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, dan 6) IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

<sup>21</sup> Sampai sekarang tercatat 14 IAIN di seluruh Indonesia.

<sup>22</sup> Sampai sekarang tercatat 33 STAIN di seluruh Indonesia.

<sup>23</sup> Baca Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terjemahan TIM Redaksi, (Jakarta: LP3ES, 1972).

